

Abstrak

Peneliti berupaya untuk menemukan bagaimana pembingkaihan yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat terhadap isu Sabda Raja. Munculnya Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Sabda yang berisikan pergantian gelar Sultan serta penghapusan perjanjian Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan dan pergantian gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dianggap mengubah tatanan Keraton Yogyakarta yang sudah ada sejak ratusan tahun. Pergantian gelar dengan mengubah Buwono menjadi Bawono serta penghapusan Khalifatullah dirasa dapat juga mengubah perjanjian Keraton Yogyakarta dengan Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja yang berkuasa tetap bersikukuh mempertahankan sabda yang telah dikeluarkannya. Menurutnya, sabda tersebut merupakan petunjuk dari leluhur demi kelangsungan Keraton Yogyakarta. Hal inilah yang ditentang oleh adik-adik Sultan yang menganggap Sultan telah menyalahi aturan dan dapat berakibat buruk. Banyak pro dan kontra yang juga terjadi di masyarakat. Peneliti melakukan analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman. Model ini melihat dengan menggunakan empat perangkat yaitu: pendefinisian masalah, sumber atau penyebab, membuat keputusan moral dan penekanan penyelesaian. Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kedaulatan Rakyat tidak menonjolkan keberpihakannya pada peristiwa Sabda Raja. Kedaulatan Rakyat lebih mengutamakan perannya sebagai jembatan antara pihak Keraton dan masyarakat. Selain itu, dalam pemberitaannya KR lebih banyak menyajikan adu argument antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan para *Rayi Dalem*. Dari beberapa penekanan penyelesaian yang disajikan, lebih mengacu agar keluarga Keraton dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan masyarakat dihimbau untuk tidak ikut campur.

Kata Kunci: Sabda Raja, Sri Sultan Hamengku Buwono X,